

# KOLABORASI TATA KELOLA EKOLOGI ADMINISTRASI: PEMBANGUNAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

Engkus<sup>1</sup>, Fadjar Tri Sakti<sup>2</sup>, Indra Kristian<sup>3</sup>

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia<sup>3</sup>

E-mail: engkus @uinsgd.ac.id

## ABSTRAK

*Pembangunan suatu desa dibutuhkan kolaborasi antara aktor-aktor ekologi administrasi publik. Aktor-aktor tersebut yaitu pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi/ perguruan tinggi. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung secara kolaboratif antara pemerintah desa dengan mitranya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi aktor-aktor ekologi administrasi publik di Desa Sukamanah dan mendeskripsikan bagaimana kerjasama antar para aktor dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan library research. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antar pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha setempat dalam melakukan pembangunan. Namun demikian tidak semua masyarakat terlibat dalam pembangunan desa, hanya perwakilan yang terpilih menjadi pengurus pembangunan. Hingga saat ini pembangunan desa Sukamanah terbilang lancar, sekalipun masih ada beberapa program yang belum terlaksana.*

**Kata Kunci:** Kolaborasi Tata Kelola, Ekologi Administrasi Pembangunan, Masyarakat, Pemerintah Desa.

## ABSTRACT

*The development of a village requires collaboration between public administration and ecological actors. These actors are village government, community, business world, media, and academics/universities. The success of a development is highly dependent on collaboration between the village government and its partners. The purpose of this research is to find out the collaboration of public administration ecological actors in Sukamanah Village and describe how collaboration between actors in village development. This study uses a qualitative research approach that is descriptive in nature. Data collection techniques through observation, interviews, and library research. The results of the research show that there is a collaboration between the village government, the community, and the local business world in carrying out development. However, not all communities are involved in village development, only elected representatives become development administrators. Until now, the development of Sukamanah village has been fairly smooth, although there are still several programs that have not been implemented.*

**Keywords:** Governance Collaboration, Development Administration Ecology, Community, Village Government.

## PENDAHULUAN

Ekologi administrasi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pemerintahan,

administrasi negara dianalogikan sebagai makhluk hidup yaitu seluruh kegiatan kenegaraan, kegiatan menjalankan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu organisasi

publik. Lingkungan dianalogikan sebagai alam yang berwujud fisik dan dari segi sosial yaitu kemasyarakatan. Tinjauan ekologis terhadap administrasi yaitu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, yang kemudian pengaruh tersebut memberikan ciri khas pada administrasi tersebut. Ekologi administrasi publik dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan, pembangunan pada bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Atau ilmu yang mempelajari adanya proses saling memengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dan lembaga-lembaga tertinggi negara ataupun antarpemerintah, vertikal-horizental dan masyarakatnya. Berdasarkan teori struktural fungsional dari K. Marton (1985), masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari elemen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling menyatu dalam keseimbangan. Sistem administrasi tidak terlepas keterkaitannya dengan struktur kemasyarakatan. Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam ekologi administrasi publik adalah pemerintah dan masyarakat.

Setelah reformasi, sistem politik Indonesia menjadi demokrasi. Sistem ini telah banyak diterapkan di negara-negara barat dan terbukti berhasil terutama dalam hal pembangunan ekonomi. Demokrasi memberi kekuatan bagi eksistensi daerah pada tingkatan administratif yang lebih rendah. Keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang saling bekerjasama demi memajukan daerahnya.

Artikel ini membahas mengenai keterlibatan elemen masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamanah. Peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Sukamanah yang dikaji secara kolaborasi antar aktor-aktor ekologi administrasi publik di Desa Sukamanah. Di era 4.0 dan 5.0 ini dinamika masyarakat begitu serba cepat dan

terkadang tidak menentu bahkan cenderung *turbulence*, sehingga dibutuhkan tata Kelola yang kolaboratif antar elemen. Berdasarkan hasil observasi bahwa tata Kelola pembangunan Desa telah melibatkan masyarakat, dunia usaha secara *triple helix*, namun belum optimal. Tujuan peneliti untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterlibatan pemerintah dan masyarakat di Desa Sukamanah dalam pembangunan Desa. Karena kesuksesan suatu pembangunan harus didukung oleh interaksi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Colaborative Governance*

Menurut Ansell & Gash (2007:544): *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterkaitan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non publik.

Sedangkan Zadek (2006), mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kemitraan publik-swasta, pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non-negara, aktor komersial dan non-profit telah lahir dari partisipasi pragmatisme.

Inisiatif ini telah diketahui partisipan dalam melihat sinergitas potensi kapasitas dalam memanfaatkan hasil yang lebih baik untuk semua pihak. Hal ini cukup berbeda dengan visi kerangka ideologis pada generasi sebelumnya utopia-utopia institusional seperti nasionalisasi dan privatisasi. Tapi kurangnya sebuah narasi menyeluruh sampai saat ini tidak boleh menipu kita pada analisa fakta yang tersembunyi dibawah permukaan *ad hoc* karena kegiatan ini adalah usaha baru yang paling menarik di sepanjang jalur akuntabilitas untuk pengembangan. Memang, bentuk-bentuk baru dari pemerintahan kolaboratif cenderung untuk memberikan dinamika yang paling radikal dari pemahaman kita dan praktek akuntabilitas di zaman modern (O'brien, 2012:1).

Berbeda halnya dengan definisi *Collaborative Governance* yang dijelaskan Agrawal dan Lemos (2007), *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama *public-privat* dan privat-sosial (Balogh, dkk., 2011:3).

Definisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh (2011:2), bahwa:

*collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Sementara Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut (Kumorotomo, 2013:10).

Dwiyanto (2011:251), menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Sejalan dengan definisi yang disampaikan Dwiyanto, Sink menjelaskan kerjasama kolaboratif sebagai proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak mencapainya secara sendiri-sendiri (Dwiyanto, 2011:251).

*Collaborative Governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan

masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Purwanti, 2016:178).

### **Ekologi Administrasi**

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan.

Ekologi selalu berkaitan dengan ilmu lain, seperti ekonomi, teknologi, politik, dan sosial budaya. Ekologi memang penting, tetapi bukan satu-satunya landasan dalam mengambil keputusan dalam permasalahan lingkungan hidup. Ekologi adalah salah satu masukan, satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang.

Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan memengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, *security* (keamanan), dan *natural resource* (sumber daya alam).

Peran suatu masyarakat dalam bidang politik (infrastruktur), ekonomi

(pendapatan/institusi), sosial budaya (pendidikan dan agama), dan hankam (tentram/tertib) jelas sangat memengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga akan memengaruhi faktor-faktor lingkungannya, dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atmosudirjo (1978) mendefinisikan “ekologi” sebagai “...tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbal-balik) antara satu organisme dan lingkungan sekelilingnya”.

### **Faktor – Faktor Ekologi dalam Administrasi Negara**

Faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan dimensi lingkungan, politik, kultur, hukum, politik, ekonomi, teknologi, struktur, manusia, pilihan strategi, kewenangan, pembagian tugas, spesialisasi, proses dan prosedur pengoperasian, harus dipertimbangkan karena turut menentukan keberhasilan mencapai tujuan.

Dalam hubungan itu, Olsen (2004) mengutip pandangan John M. Gaus: “*The six factors are: people, place, physical technology, social technology, whises and ideas, catastrophe, and personality*”. Riggs berpendapat bahwa faktor-faktor ekologi administrasi negara, yaitu *economic foundation, social structure, communication network, ideological/symbol patterns and political system*. Nigro (1980) menyarankan faktor-faktor ekologi administrasi negara, antara lain *population changes, advances in physical technology, advances in social inventions, and ideological environment*.

Pamudji (2004) menekankan pada komponen sistem lingkungan, masukan, proses konversi, keluaran, dan umpan balik. Lahirnya Ilmu Perbandingan Administrasi Negara semakin menegaskan adanya pengakuan akademis terhadap karakteristik ekologis yang dimiliki oleh suatu wilayah pemerintahan. Seperti ditulis oleh Keban (2008) bahwa

beberapa kelompok pakar dari Universitas Indiana, Michigan State, Syracuse, Southern California, dan Pittsburg, mengingatkan untuk tidak memaksakan penerapan manajemen Barat ke negara sedang berkembang karena membutuhkan banyak persyaratan khusus. Penganjurannya adalah Rondinelli, Bryant dan White, Kiggudu, Ingle, Uphoff, Kortzen, Lindenberg dan Crosby, Chambers, Brinkerhoff, dan Esman.

Karena kekhususan faktor-faktor itulah, terdapat perbedaan ekologis dari birokrasi pemerintahan dalam konstelasi lintas negara ataupun lintas daerah.

Faktor-faktor ekologis administrasi negara dapat dilihat dari aspek-aspek kehidupan nasional yang terdiri atas dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek kemasyarakatan. Fred. W. Riggs (1996) membagi faktor ekologis ke dalam beberapa aspek berikut. 1. Aspek-aspek Alamiah Kehidupan Nasional Faktor-faktor ekologis administrasi negara Indonesia yang diperinci sejalan dengan aspek-aspek alamiah kehidupan nasional, yaitu sebagai berikut. a. Lokasi dan Posisi Geografi Lokasi dan posisi geografi meliputi beberapa hal. 1) Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. 2) Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara Indonesia dapat dilihat dari bentuk wujud negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan, letak astronomiknya yang berada di daerah tropis, posisi silang antara dua benua, dan dua samudra. 3) Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Geografi Indonesia merupakan lautan yang di tengah-tengahnya bertebaran pulau-pulau sehingga laut antara dua pulau menjadi perairan dalam.

1. Keadaan dan Kekayaan Alam Keadaan dan kekayaan alam meliputi beberapa hal berikut ini: 3) Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara, yang tampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum mampu menggali sumber kekayaan alam secara maksimal sehingga membutuhkan bantuan asing, baik berupa modal maupun tenaga ahli. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber-sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini diperlukan kerja sama dengan pihak asing. 4) Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh ini sangat terbatas karena kekayaan alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruhnya terbatas pada mengubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk menjadi tenaga listrik, tanah yang subur diubah menjadi tanaman padi agar menghasilkan padi.

2. Keadaan dan Kemampuan Penduduk Keadaan dan kemampuan penduduk meliputi beberapa hal berikut. 5) Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: a) jumlah penduduk, b) distribusi sosial, c) komposisi (umur), d) penghasilan penduduk, e) tingkat pendidikan, dan f) kesehatan penduduk. 6) Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Program pemerintah diimplementasikan oleh administrasi negara dapat mengubah keadaan dan kemampuan penduduk, antara lain sebagai berikut. a) Kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jendral Transmigrasi dengan jajarannya dan unsur-unsur administrasi negara lain, misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi untuk menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. b) Kementerian Kesehatan membuat program-programnya di bidang

kesehatan yang dapat memengaruhi keadaan kesehatan penduduk.

### **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan, dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Akan tetapi, pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memerhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip keefisiensi. Artinya, tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk

mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan (pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta kerusakan hutan) terjadi karena perilaku dan aktivitas manusia yang tidak bijaksana dan tidak cerdas dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya ekosistem lingkungan menjadi terganggu.

### **Peran Penting Masyarakat dalam Pembangunan**

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Dalam GBHN pembangunan nasional juga telah menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki negara dilakukan secara bijaksana sebagai landasan pembangunan tahap berikutnya. Oleh sebab itu peningkatan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terutama yang menyangkut secara langsung kehidupan dan masa depan mereka. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 5 ayat 1). Serta mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal berikutnya menegaskan bahwa setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 6). Peranan informasi dalam pengelolaan lingkungan sangat penting oleh karena itu setiap orang juga berhak atas dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang lingkungan hidup yang benar dan akurat. Peran serta masyarakat

dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “*Public Private Partnership*”.

Ada beberapa yang bisa dilakukan agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan antara lain: a. Hak masyarakat terhadap sumberdaya alam harus diperhatikan; b. Perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak lain; c. Pengembangan peluang untuk mengambil keputusan yang partisipatif. Proses perencanaan pembangunan yang terpadu dan partisipatif sebagai salah satu tahap yang penting, perlu dikembangkan sehingga semua pihak ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya; d. Ego sektoral harus dihilangkan; e. Perlu ada komitmen yang tinggi dari pengambil keputusan formal di daerah, karena tanpa dukungan mustahil kebijakan bisa diterapkan; e. Perlu memperkuat aspek “*Public relation*” stakeholder, khususnya masyarakat melalui LSM, sehingga semua informasi mengenai kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup bisa tersampaikan kepada pihak lain dengan baik; f. Otonomi daerah harus bisa dilaksanakan secara penuh, sehingga pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah mempunyai kewenangan untuk bisa memutuskan (Renggana, A. 1999); g. Revitalisasi ketentuan Pasal 10 ayat c UUPH No. 23 Tahun 1997 yang menyatakan: Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Guna mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemimpin eksekutif yang terbuka;
2. Peraturan yang akomodatif;
3. Masyarakat yang sadar lingkungan;
4. 4.Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
5. Informasi yang tepat;
6. Keterpaduan (Hardjosoemantri, K. 1986).

### **Peran Penting Pemerintah Desa dalam Pembangunan**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, Desa memegang peranan yang sangat penting, sebab Desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi

sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Keberhasilan suatu pembangunan yang didefinisikan sebagai keadaan prestasi yang harus dicapai bersama-sama antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mewujudkan tingkat ekonomi dan taraf hidup masyarakat, tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program tentang pembangunan yang sudah diterapkan di desa, yang mana sudah deprogram oleh pemerintah desa. Peningkatan kemampuan berkembang secara mandiri, diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, kemampuan dalam mengembangkan usaha, kemampuan dalam menabung, dan sebagainya. Tingkat tercapainya tujuan atau sasaran pembangunan desa harus dapat diperbaiki guna untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia dengan fokus terhadap Desa yang melakukan pembangunan desa, dengan alasan sebagai berikut: pertama, isu pembangunan Desa sering muncul di pemberitaan dan perbincangan masyarakat, menjadikan topik ini menarik untuk diteliti. Kedua, bahwa pembangunan desa merupakan kebijakan level terdekat ke rakyat (*street level policy*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui dan mengamati kondisi aktual di lapangan, baik di Birokrasi Desa

terkait dalam penelitian maupun masyarakat terkait isu pembangunan di desa. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data mendalam dari informan, berdasarkan kecukupan dan kepatutan dari 3(tiga) level: kebijakan/konseptual, teknik operasional dan masyarakat/pemerhati masalah korupsi sebagai subyek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena/masalah yang diangkat dalam penelitian kualitatif, yang terbagi menjadi: (1) seorang informan kepala desa Sukamanah kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur sebagai informan level kebijakan/konseptual, (2) dua informan utama (Sekretaris Desa Sukamanah) sebagai informan yang mengetahui secara detail “pelaku utama” dalam teknis operasional, (3) informan pendukung adalah masyarakat sebagai informan yang memberikan tambahan informasi yang berguna dan relevan serta pihak-pihak yang terkait dengan perilaku informan utama. Riset studi dokumentasi digunakan untuk menggali bahan penelitian berupa dokumentasi dan lainnya tersedia di Desa Sukamanah dan di masyarakat. Tabel 1 menunjukkan data informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Informan Penelitian**

<b>Informant</b>	<b>Initials</b>	<b>Total</b>
<b>Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur</b>	KADS	1
<b>Sekretaris Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur</b>	SEKD	1
<b>Masyarakat Dunia Usaha</b>	MASY DUN	1 1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Sumber: Primary data

Teknik studi literatur digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen mengenai tata

Kelola pembangunan di Desa Sukamanah. Dengan meninjau dokumentasi, peneliti bermaksud untuk meneliti realisasi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN) di daerah tingkat Implementasi (Engkus,E,et al, 2022).

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, meliputi 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) menarik kesimpulan/verifikasi. (1) Reduksi data dilakukan melalui pengumpulan data baik dari Desa Sukamanah Kabupaten Cianjur dan masyarakat melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi/pustaka. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang muncul dari lapangan. Artinya pada tahap ini peneliti mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, mengeliminasi data yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya. (2) Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan data yang terstruktur dan relevan serta menampilkannya untuk memudahkan dalam menggambarkan kesimpulan. (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan melalui diskusi dan interpretasi untuk merumuskan temuan penelitian, kebaruan, kesimpulan, dan kontribusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Sukamanah merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia, dipimpin oleh Bapak Iyus Sutomo, yang berjumlah 6.558 orang penduduk. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, narasumber yang merupakan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu Bapak Hendi Rohendi mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan agenda yang terus dilakukan di Desa Sukamanah pada setiap tahunnya. pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan

lembaga-lembaga masyarakat. perencanaan Pembangunan di Desa Sukamanah tentunya menyesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Berikut ini program-program yang ada di Desa Sukamanah :

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program prioritas di RPJNM 2020-2024 dalam hal peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau. Di desa sukamanah program ini sudah terrealisasikan dan sebanyak 20 rumah yang mendapatkan bantuan melalui program ini.
2. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan pada malam hari. pemerintah desa hanya menjalankan program PJU ini hanya di beberapa jalan yang memang gelap saja, seperti jalan yang melewati hutan-hutan dan pemukiman yang baru sedikit penduduknya.
3. Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) merupakan program rehabilitasi rumah yang tidak layak huni dan tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Program RUTILAHU di Desa sukamanah akan dilaksanakan pada pertengahan tahun yaitu antara bulan juli atau agustus.
4. Jalan setapak, merupakan jalan yang dipakai untuk para pejalan kaki, program ini sudah terrealisasikan di beberapa kampung, yaitu di kampung Cijengkol dan kampung Cipayung
5. Gedung Sarana Olahraga (SARGA) merupakan gedung sarana olahraga bagi para penduduk Desa Sukamanah, gedung ini sering dipakai untuk olahraga pada setiap hari minggu oleh ibu-ibu, bulu tangkis, dan tenis meja. Tidak hanya dipakai olahraga gedung ini juga sering dipakai rapat-rapat besar dan acara-acara besar.

6. Sumur Bor, dapat diketahui bahwa tidak semua wilayah pedesaan mudah air ada beberapa wilayah yang susah air, di Desa sukamanah salah satunya ada di wilayah Cicalung yang terpilih mendapat pembangunan Sumur bor, karena salah satu perkampungan yang sangat sulit air.
7. Perbaikan/pembersihan selokan, program ini sudah terrealisasikan di Desa Sukamanah, disetiap selokan dilakukan perbikan pinggir-pinggirnya jadi selokan tidak terlihat menjijikan dan masyarakat di larang membuang sampah ke selokan.
8. Irigasi, program ini sebenarnya program Pemerintah Desa pada tahun 2019, namun diangkat lagi atau diajukan lagi oleh Bapak Kepala Desa yaitu Bapak. Iyus Sutomo.

Dalam semua program-program yang telah terealisasi pemerintah sangat berpartisipasi dalam pembangunan ini, bapak kepala desa pun ikut terjun kelapangan dan selalu memantau pembangunan, sehingga berjalan dengan lancar. Program penghambatnya hanya dibagian keungan saja, kerena dana dari pemerintah pusat belum turun dan belum sesuai dengan waktunya. Karena tidak semua program dilaksanakan di waktu yang sama.

Berikut 3 faktor pendukung sehingga pembangunan berjalan dengan lancar menurut ketua BPD Desa Sukamanah :

1. Kondusifnya antara lembaga yang ada di Desa Sukamanah, yaitu antara BPD dan Pemerintah Desa, sehingga pembangunan yang ada di Desa Sukamanah berjalan lancar, efektif, dan efisien.
2. Memberdayakan potensi pekerja di wilayah/ pembangunan tersebut.
3. Koordinasi antara semua masyarakat.

Ketua BPD mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sukamanah semua ikut berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga pembangunan selalu berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Bedanya di tahun-tahun pemerintahan yang lalu jika ada pembangunan, para pekerjanya

tidak dari kampung tersebut tapi dibentuk para pekerja yang khusus bekerja dalam pembangunan desa, tahun pemerintahan sekarang jika ada pembangunan di suatu kampung maka para pekerjanya dari kampung tersebut, sehingga tidak menimbulkan kedengkian di antara masyarakat.

Peneliti pun melakukan observasi kepada beberapa masyarakat di kampung Cijengkol, Desa Sukamanah. Ada beberapa penduduk yang mengetahui bahwa di Desa Sukamanah ada program pembangunan dan ada juga masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui adanya program pembangunan. Ibu Rukoyah salah satu warga Cijengkol mengungkapkan, ia mengetahui program-program yang ada di Desa Sukamanah namun tidak berpartisipasi dalam pelaksanaannya, karena menurutnya sudah ada masyarakat yang ahli dan dipilih dalam pembangunan tersebut. Menurutnya beberapa program sudah terrealisasikan, seperti jalan setapak dan perbaikan rumah, namun ada beberapa program yang belum terlaksanakan. Masyarakat kampung Cijengkol mengungkapkan, sangat berharap pembangunan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semua masyarakat yang ada di Desa Sukamanah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya peran pemerintah Desa Sukamanah dalam pembangunan desa ditandai dengan terciptanya kondisi yang cukup kondusif antar lembaga Desa yaitu BPD dan Pemerintah Desa Sukamanah. Terkait keterlibatan elemen masyarakat dalam pembangunan di Desa Sukamanah masih belum semua terlibat hanya perwakilan masyarakat yang menjabat sebagai pengurus pembangunan Desa Sukamanah. Keterlibatan masih secara *triple helix* (Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia usaha setempat), Program pembangunan di Desa Sukamanah masih berjalan lancar dan

masih ada beberapa program yang belum terlaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Tendi, Steffy. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*.
- Anggara, Sahya. (2018). *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer, dan Kontekstual*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Adnan, Indra Muchlis dan Sufian Hamim. (2015). *Ekologi Administrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.
- Ardhana, I Putu Gede. *Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan*. Unud.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Engkus, E. (2017). *Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
- Engkus, E., Sakti, F. T., & Kristian, I. (2022). *Good governance: Implementation of the non-cash food assistance program in Bandung City of Indonesia*. Res Militaris, 13(1), 287-298.
- H.G. Surie, (1987). *Ilmu Administrasi Negara; Suatu Bacaan Pengantar, Terjemahan Samekto*, Cet. 1, Jakarta: Gramedia.
- Kumorotomo, W et al (2013). *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
- Ngongano, Yuliana. *Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan*. Univ. Halmahera.
- Pramudji, S., (2004). *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- R.P. Misra, (1991). *Regional Development Planning: Search for Bearing*, Nagoya: UNCRD.
- Robertson, P. J., & Choi, T. (2012). *Deliberation, consensus, and stakeholder satisfaction: A simulation of collaborative governance*. Public Management Review, 14(1), 83-103.
- Rozak, Andi Rosidanti. (2013). *Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan : Univ. Muhammadiyah Makassar*.
- Yeremias T. Keban, (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Issu*, Yogyakarta: Gavamedia.